ABSTRAKS

Muhammad Sopiyan: *Perceraian pada Keluarga Karier di Pengadilan Agama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Hubungannya Pasal 33-34 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Pasal 33-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami harus menafkahi keluarga sedangkan istri harus membantu urusan rumah tangga. Namun, banyak istri yang berkarir di luar rumah, sehingga pasal yang dimaksud tidak dilaksanakan dengan baik, yang akhirnya berujung pada perselisihan perkawinan yang berakhir dengan perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan perceraian pada keluarga karier di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung; (2) Menganalisis faktor penyebab terjadinya perceraian pada keluarga karier di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama; (3) Menganalisis hubungan perceraian keluarga karier di Pengadilan Agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Bandung dengan Pasal 33-34 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan; dan (4) menguatkan pengembangan konsep keluarga yang harmoni pada keluarga karier hubungannya dengan pelaksanaan Pasal 33-34 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Grand theory* yang digunakan adalah teori *Mashlahat*, *middle rang theory* menggunakan teori *Legal System*, dalam *The Legal System : A Social Science Perspective*, menegaskan bahwa sistem hukum tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) struktur; (2) substansi; (3) kultur hukum. *Applied Theory*: Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, bahwa hukum diadakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dan pendekatan yuridis empirif, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh peneliti terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini berupaya menggambarkan objek penelitian secara objektif dan sebagaimana adanya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, penelitian ini berupaya menggambarkan isi materi Putusan Pengadilan Agama dan menemukan esensi perkara yang menjadi alasan perceraian. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya memberikan deskripsi fenomena tetapi juga menjelaskan hubungan antara keluarga karir dan perceraian para pihak. Penelitian tersebut memaparkan dan menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh peneliti terkait objek penelitian berupa keluarga karir yang bercerai di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Hasil penelitian ini disimpulkan: (1) Faktor penyebab Perceraian pada keluarga karier di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 70 persen merupakan gejala pergeseran peran isteri sebagai ibu rumah tangga yang ikut menanggung beban ekonomi keluarganya tetapi tidak ada kesepahaman dengan pihak suaminya sehingga terjadi perceraian, 30 persen isteri selingkuh, suami selingkuh, isteri tidak ikhlas bekerja; (2) Beberapa faktor yang sangat dominan terjadinya peceraian pada keluarga karir 1) Minimnya pemahaman Agama Islam yang menjadi faktor perceraian keluraga karir 2) Suami tidak mengajarkan agama islam sehingga ajaran ajaran tidak dapat menjadi rumusan dalam menjalakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, we rahmah. 3) Diperlukan literasi tentang konsep pernikahan baik secara Agama maupun secara undang-undang 4) Tidak adanya perjanjian pranikah yang mengikat tentang karier atau non karier yang akan dijalankan oleh kedua mempelai; (3) Implementasi relasional Pasal 33-34 dal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perceraian keluarga karier di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan terdiri atas: (a) Hubungan vertikal antara UU No 1 /1974 Jo UU No 16/2019 dengan UU No Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. juga disebut hubungan yuridis formil dan materil; (b) Hubungan horizontal, yakni hubungan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perceraian dengan perilaku masyarakat; (c) Hubungan rasional antara norma hukum dan perilaku masyarakat (4) Pengembangan konsep keluarga yang harmoni pada keluarga karier hubungannya dengan pelaksanaan Pasal 33-34 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat ditambah pasal baru atau penjelasan terhadap pasal mengenai hak dan kewajiban suami-isteri yang dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga berdasarkan

interpretasi *mubadalah*, relasi fungsional kepemimpinan dalam rumah tangga, dan *al-mashlahah al-mu'tabarah*.

ABSTRACT

Muhammad Sopiyan: *The Divorcement Family Career in the Religious Court in the Region of the Bandung High Court of Religion with its Relationship Articles 33-34 in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 Concerning Marriage.*

Article 33-34 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that the husband must provide for the family while the wife must help with household chores. However, many wives have careers outside the home, so the article in question is not implemented properly, which ultimately leads to marital disputes that end in divorce.

The objectives of this study are: (1) To describe divorce in career families in the Religious Court in the Bandung High Religious Court area; (2) To analyze the factors causing divorce in career families in the Religious Court in the Bandung High Religious Court area; (3) To analyze the relationship between divorce in career families in the Religious Court in the Bandung High Court area and Articles 33-34 in the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; and (4) to strengthen the development of the concept of a harmonious family in career families in relation to the implementation of Articles 33-34 in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

This research is included in qualitative research that uses descriptive analysis research methods, and an empirical legal approach, namely describing and explaining the facts obtained by researchers related to the object of research. This research attempts to describe the object of research objectively and as it is. To get a clear picture of the object of research, this research attempts to describe the contents of the Religious Court Decision and find the essence of the case that is the reason for divorce. Therefore, researchers not only provide a description of the phenomenon but also explain the relationship between career families and the divorce of the parties. The research describes and explains the facts obtained by researchers related to the object of research in the form of career families who divorced in the Bandung High Religious Court area.

The results of this study concluded: (1) The factors causing divorce in career families in the Religious Court in the Bandung High Religious Court Area, 70 percent are symptoms of the shift in the role of the wife as a housewife who also bears the economic burden of her family but there is no understanding with her husband so that divorce occurs, 30 percent of wives have affairs, husbands have affairs, wives are not sincere in working; (2) Several factors that are very dominant in divorce in career families 1) Lack of understanding of Islam which is a factor in divorce in career families 2) Husbands do not teach Islam so that the teachings cannot be a formulation in running a family life that is sakinah, mawaddah, we rahmah. 3) Literacy is needed about the concept of marriage both in terms of religion and law 4) There is no binding prenuptial agreement regarding the career or non-career that will be carried out by both the bride and groom; (3) Implementation of the relational provisions of Article 33-34 of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regarding divorce of career families in the Religious Court in the Bandung High Religious Court Area, consisting of: (a) Vertical relationship between Law No. 1/1974 Jo Law No. 16/2019 with Law No. Religious Courts, and Compilation of Islamic Law. also called formal and material legal relationship; (b) Horizontal relationship, namely the relationship between applicable laws and regulations on divorce and community behavior; (c) Rational relationship between legal norms and community behavior (4) Development of the concept of a harmonious family in career families in relation to the implementation of Articles 33-34 in Law Number 1 of 1974 Marriage can be supplemented with new articles or explanations to articles regarding the rights and obligations of husband and wife which can help ease the family's economic burden based on the interpretation of mubadalah, functional relations of leadership in the household, and al-mashlahah al-mu'tabarah.

ملخص

محمد سفيان: الطلاق في الأسرة المهنية في المحكمة الدينية منطقة المحكمة الدينية العليا في باندونغ علاقته بالمواد 33-34 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج.

تنص المادة 33-34 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج على أنه يجب على الزوج إعالة الأسرة بينما يجب على الزوجة المساعدة في شؤون المنزل. لكن العديد من الزوجات يعملن خارج المنزل، لذلك لا يتم تطبيق المادة المعنية بشكل صحيح، مما يؤدي في النهاية إلى خلافات زوجية تنتهي بالطلاق

أهداف هذا البحث هي: (1) وصف الطلاق في الأسر المهنية في المحاكم الدينية في منطقة المحكمة الدينية العليا في باندونج؛ (2) تحليل العوامل المسببة للطلاق في الأسر المهنية في المحاكم الدينية في منطقة المحكمة الدينية العليا؛ (3) تحليل العلاقة بين الطلاق العائلي والطلاق الوظيفي في المحاكم الدينية في منطقة المحكمة العليا في باندونغ من خلال المواد 33-34 في قانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج؛ (4) تعزيز تطوير مفهوم الأسرة المتناغمة في الأسر المهنية فيما يتعلق بتنفيذ المواد 33-34 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج

يندرج هذا البحث في البحث النوعي الذي يستخدم أساليب البحث الوصفي التحليلي والمنهج القانوني التجريبي، أي وصف وشرح الحقائق التي حصل عليها الباحثون والمتعلقة بموضوع البحث. يحاول هذا البحث وصف موضوع البحث بموضوعية وكما هو في الواقع. وللحصول على صورة واضحة لموضوع البحث، يحاول هذا البحث وصف محتوى مادة قرار المحكمة الشرعية واكتشاف جوهر القضية التي هي سبب الطلاق. ولذلك فإن الباحثة لا تقدم وصفاً للظاهرة فحسب، بل تشرح أيضاً العلاقة بين مهنة الطرفين والطلاق. يصف هذا البحث ويشرح الحقائق التي حصل عليها الباحثون فيما يتعلق بموضوع البحث في شكل الأسر المهنية المطلقة في منطقة المحكمة الدينية العليا في باندونغ.

وخلصت نتائج هذا البحث إلى ما يلي: (1) العوامل المسببة للطلاق في الأسر المهنية في المحاكم الدينية في منطقة المحكمة الدينية العليا في باندونغ، 70 في المائة هي أعراض تحول في دور الزوجة كربة منزل تشارك في العبء الاقتصادي للأسرة ولكن لا يوجد تفاهم مع زوجها حتى يحدث الطلاق، 30 في المائة من الزوجة تخون، الزوج يخون، الزوجة غير مستعدة للعمل؛ (2) هناك عدة عوامل مهيمنة جدًا في حدوث الطلاق في الأسر المهنية 1) عدم فهم الدين الإسلامي الذي يعد أحد عوامل الطلاق في الأسر المهنية 2) الأزواج لا يعلمون الدين الإسلامي لذلك لا يمكن أن تكون التعاليم هي الصيغة لتنفيذ سكينة ومودة ورحمة الحياة الأسرية3) مطلوب معرفة القراءة والكتابة فيما يتعلق بمفهوم الزواج دينياً وقانونياً. 4) لا يوجد اتفاق ملزم قبل الزواج فيما يتعلق بالمهنة أو غير المهنية التي سيقوم بها العروس والعريس. (3) التنفيذ العلائقي للمواد 33-34 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج فيما يتعلق بالطلاق الأسري المهني في المحاكم الدينية في منطقة المحكمة الدينية العليا في باندونغ، والتي تتكون من: (أ) العلاقة العمودية بين القانون رقم 1974/1 بالتزامن مع القانون رقم 2019/16 بالقانون رقم المحاكم الشرعية، وجمع الشريعة الإسلامية. وتسمى أيضًا العلاقات القانونية الرسمية والمادية؛ (ب) العلاقات الأفقية، أي العلاقة بين القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالطلاق وسلوك المجتمع؛ (ج) العلاقة العقلانية بين القواعد القانونية وسلوك المجتمع (4) تطوير مفهوم الأسرة المتناغمة في الأسر المهنية فيما يتعلق بتنفيذ المواد 33-34 في القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج. ويمكن إضافة مواد جديدة أو تفسيرات للمواد المتعلقة بحقوق والتزامات الزوج والزوجة والتي يمكن أن تساعد في تخفيف العبء الاقتصادي على الأسرة استنادا إلى تفسيرات المبجدي، والعلاقات الوظيفية للقيادة في الأسرة، والمصالحة المتبررة.